

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting yang dihasilkan oleh perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas dari suatu perusahaan kepada para pemegang kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan, karena dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang penting mengenai perusahaan seperti asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan serta beban-beban. Laporan keuangan sendiri diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pemegang kepentingan dalam mengambil keputusan.

Laporan laba-rugi merupakan laporan yang paling menarik untuk dilihat dalam laporan keuangan, karena dalam laporan laba-rugi mengandung komponen laba di dalamnya. Informasi mengenai laba merupakan perhatian utama para pengguna laporan keuangan untuk menaksir kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, laba merupakan salah satu informasi yang berpeluang menjadi objek diskresi oleh pihak manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak tanpa memikirkan pihak lain seperti investor, kreditor dan lainnya.

Diskresi yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan biasanya dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba yang akan tertera dalam laporan keuangan dapat sesuai dengan keinginan manajemen. Diskresi yang dimiliki ini digunakan oleh manajemen

agar laporan keuangan perusahaan terlihat baik dimata para pengguna, walaupun kondisi ini tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya di dalam perusahaan namun manajemen masih sering untuk melakukannya. Perilaku yang dilakukan manajemen tersebut disebut dengan istilah manajemen laba (*earnings management*) (Suryadi, 2021).

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja keuangan (Sulistyanto, 2008:6). Masalah yang timbul mengenai manajemen laba yaitu adanya benturan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dimana informasi yang diterima oleh *principal* lebih sedikit dari pada *agent*. Kondisi tersebut biasa disebut dengan konflik keagenan (Panjaitan & Muslih, 2019).

Manajemen seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal*. Perbedaan informasi yang diterima manajemen dan *principal* membuat manajemen akan bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Informasi yang diterima manajemen lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh *principal*, sehingga manajemen dapat melakukan praktik manajemen laba dengan mengubah laporan keuangan perusahaan untuk mengelabui *principal*.

Beberapa fenomena mengenai manajemen laba yaitu seperti pada kasus PT Indofarma (Persero) Tbk dilakukan pada tahun 2001. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bukti-bukti pada saat melakukan penelitian pada laporan keuangan tahun 2001 dengan dugaan pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal. PT Indofarma (Persero) Tbk mencatatkan nilai persediaan barang dalam proses lebih tinggi daripada seharusnya (*overstated*) dalam penyajian persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar. Hal tersebut mengakibatkan harga pokok penjualan mengalami *understated* dan menyebabkan laba bersih perusahaan dicatat lebih

tinggi daripada seharusnya yakni senilai Rp 28,87 miliar. Dengan adanya temuan tersebut, pada tahun 2004 OJK memutuskan untuk memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500 juta kepada jajaran direksi PT Indofarma (Persero) Tbk yang menjabat pada periode terbit laporan keuangan tahun 2001 (Sandria, 2021).

Fenomena selanjutnya mengenai manajemen laba yaitu kasus mengenai Garuda Indonesia. Kasus ini bermula pada saat Garuda Indonesia melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 24 April 2019. Dalam RUPS tersebut salah satu agendanya yaitu mengesahkan laporan keuangan tahunan 2018. Namun, pada RUPS tersebut dua komisaris Garuda Indonesia enggan untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Dua komisaris itu adalah Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Pada laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia mencatatkan laba sebesar US\$ 5 juta atau setara dengan Rp 72,5 miliar. Namun, diketahui bahwa laba tersebut ditopang oleh kerja sama antara Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi. Nilai dari kerja sama tersebut mencapai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya masih berupa piutang dengan kontrak kerja sama yang berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dicatat langsung ditahun pertama dan diakui dalam pos pendapatan lain-lain. Setelah dilakukan penyesuaian pencatatan untuk laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia mencatatkan kerugian sebesar US\$ 175 juta atau setara dengan Rp 2,53 triliun. Selisih yang dihasilkan dari laporan keuangan sebelum penyesuaian dengan laporan keuangan setelah penyesuaian yaitu mencapai nilai sebesar US\$ 180 juta. Karena adanya kasus tersebut, perusahaan, direksi, dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa denda sebesar Rp 100 juta (Sandria, 2021). Menurut Suriati et al. (2022), manajemen laba masih dianggap sebagai tindakan yang dilakukan manajemen dengan meningkatkan laba yang dilaporkan (*overstated*) atau menurunkan laba (*understated*).

Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan masih menjadi perbincangan apakah praktik tersebut boleh dilakukan atau tidak. Para praktisi seperti pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi profesi dan regulator lainnya, berpendapat bahwa praktik manajemen laba merupakan perilaku oportunistik yang dilakukan manajer perusahaan untuk memperlakukan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Tindakan tersebut merupakan kecurangan karena manajer melakukan praktik manajemen laba secara sadar untuk mengelabui *stakeholder* dengan memberikan informasi keuangan yang kurang menggambarkan kondisi perusahaan. Namun, menurut para akademisi termasuk peneliti berargumen bahwa pada dasarnya praktik manajemen laba bukanlah sebuah kecurangan karena hal tersebut merupakan sebuah akibat dari kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan oleh beragamnya metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principle*) (Sulistyanto, 2008:5).

Para praktisi, yaitu investor, pemerintah, asosiasi profesi, dan pelaku ekonomi lainnya menganggap manajemen laba sebagai kecurangana karena aktivitas rekayasa manajerial tersebut dilakukan untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk mengetahui informasi tentang perusahaan. Secara empiris terbukti bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hancurnya tatanan ekonomi, etika, dan moral suatu bangsa. Manajemen laba tidak hanya membuat perusahaan yang melakukannya mengalami kesulitan namun secara makro juga telah mengakibatkan kesulitan ekonomi semua pihak (Sulistyanto, 2008:88).

Para akademisi, termasuk para peneliti menilai jika manajemen laba bukan sebagai kecurangan karena aktivitas rekayasa manajerial pada dasarnya merupakan dampak dari spektrum prinsip akuntansi berterima umum yang luas.

Refandanu, 2023

**PENGARUH KOMPENSASI BONUS DAN POLITICAL COST TERHADAP MANAJEMEN LABA
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BUMN TAHUN 2019-2021)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara konseptual prinsip akuntansi menyediakan beragam metode dan prosedur yang dapat dipilih dan digunakan suatu perusahaan dengan keinginannya. Perusahaan juga dapat mengganti satu metode dan prosedur akuntansi yang telah digunakan dengan metode dan prosedur akuntansi yang lain, bahkan prinsip akuntansi juga mengizinkan suatu perusahaan menyajikan ulang (*restatement*) laporan keuangan pada beberapa periode lalu (Sulistyanto, 2008:89).

Perbedaan pemahaman terkait manajemen laba disebabkan oleh perbedaan sudut pandang antara satu pihak dengan pihak lain. Meskipun fakta empiris menunjukkan bahwa manajemen laba membuat integritas dan kredibilitas dunia usaha dan akuntan serta kelayakan standar akuntansi dipertanyakan dan diragukan. Namun, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki karakteristiknya sendiri sehingga perusahaan menerapkan metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan karakteristik industrinya. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa terdapat pihak yang menyebut manajemen laba sebagai fleksibilitas standar akuntansi (Sulistyanto, 2008:90).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. Faktor tersebut bisa muncul dari dalam diri seorang manajer, maupun dari luar manajer itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu kualitas audit (Felicya & Sutrisno, 2020), *corporate governance* (E Janrosl & Lim, 2019), *gender diversity* (Prasetyo, 2022), *leverage* (Agustia & Suryani, 2018), profitabilitas (Agustia & Suryani, 2018; Lestari & Wulandari, 2019), perencanaan pajak (Achyani & Lestari, 2019), struktur kepemilikan (Felicya & Sutrisno, 2020).

Positive Accounting Theory menjelaskan bahwa terdapat tiga hipotesis yang menjadi sebuah dasar dalam terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen yaitu, *bonus plan hypothesis*, *debt to equity hypothesis*, *political cost hypothesis* (Magdalena, 2018). Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada *bonus plan hypothesis* dan *political cost hypothesis*.

Kedua hipotesis tersebut saling bertolak belakang karena dalam *bonus plan hypothesis* manajer akan mencoba untuk memenuhi target laba demi mendapatkan bonus, namun dalam *political cost hypothesis* manajer akan mencoba untuk menurunkan laba agar perusahaan tidak terkena biaya politik yang besar. *Debt to equity* tidak digunakan dalam penelitian ini karena pada penelitian ini akan berfokus kepada *income increasing* atau *decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Bonus plan hypothesis atau kompensasi bonus menurut Sulistyanto (2008:40), merupakan satu dari berbagai motivasi yang dilakukan manajemen untuk melakukan manajemen laba, manajemen cenderung menggunakan dan memilih metode-metode akuntansi yang akan meningkatkan laba perusahaan. Kompensasi bonus akan diberikan kepada manajemen apabila target dari laba perusahaan dalam periode tahun berjalan. Kompensasi bonus yang diterima oleh manajemen dapat berwujud tunjangan yang diterima secara langsung, barang, dan imbalan jasa dalam bentuk gaji (Panjaitan & Muslih, 2019).

Kompensasi bonus menjadi salah satu motivasi manajemen dalam memberikan performa terbaiknya sehingga tidak terkecuali dengan kemungkinan manajemen melakukan praktik manajemen laba untuk memaksimalkan penerimaan bonus yang akan didapat manajemen. Perilaku tersebut sesuai dengan sifat dasar manusia, pada umumnya manusia akan mementingkan diri sendiri dengan kata lain bahwa manajemen akan melakukan praktik manajemen laba semata-mata untuk dapat memaksimalkan pendapatan bonus untuk kemakmuran dirinya sendiri tanpa memikirkan efek yang akan terjadi akibat praktik manajemen laba yang telah dilakukannya. Namun menurut Wijaya & Christiawan (2014), menyatakan jika kompensasi bonus merupakan reward atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh manajemen tidak dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi adanya praktik manajemen laba walaupun manajemen termotivasi untuk meningkatkan laba guna mendapatkan bonus tersebut.

Terdapat banyak penelitian mengenai pengaruh kompensasi bonus terhadap manajemen laba seperti yang dilakukan oleh Panjaitan & Muslih (2019), Arianti et al. (2019), Muhammad & Pribadi (2020), Kusumawardhani & Khoiriyah (2021), dan Asy-Syarif & Sasongko (2021), hasil dari penelitian tersebut pun beragam. Pada penelitian yang dilakukan Panjaitan & Muslih (2019), memberikan pendapat bahwa kompensasi bonus memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin besar kompensasi bonus yang akan diberikan perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya manajemen laba dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti et al. (2019), menyebutkan bahwa kompensasi bonus memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan bonus kepada manajemen, cenderung melakukan manajemen laba. Pada penelitian yang dilakukan Kusumawardhani & Khoiriyah (2021), pula memberikan pendapat bahwa kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba, karena bonus yang direncanakan perusahaan cenderung membuat manajemen menggunakan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan agar mendapatkan penerimaan bonus yang lebih tinggi.

Namun terdapat pula penelitian mengenai pengaruh kompensasi bonus terhadap manajemen laba dengan hasil bahwa kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut dilakukan oleh Muhammad & Pribadi (2020), menunjukkan hasil bahwa kompensasi bonus tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manajemen akan tetap melakukan manajemen laba ada atau tidak ada bonus yang akan diberikan. Penelitian yang dilakukan Asy-Syarif & Sasongko (2021), menunjukkan bahwa kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa hal yang menyebabkan kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

yaitu karena kemungkinan adanya pemberian kompensasi lain berupa tunjangan lainnya, fasilitas yang diberikan perusahaan yang lebih besar.

Political Cost Hypothesis diproksikan dengan ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba dengan memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang menurunkan laba (Sulistyanto, 2008:40). Perusahaan besar akan cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pihak eksternal seperti investor, kreditor, maupun pemerintah karena aktivitasnya menyangkut hajat hidup banyak orang. Perusahaan besar cenderung untuk mengurangi labanya untuk mengurangi visibilitasnya, hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan menampilkan laba yang tinggi, pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti menaikkan pajak pendapatan perusahaan dan lainnya (Indra, 2016).

Penelitian mengenai ukuran perusahaan sudah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Lubis & Suryani (2018), Zakia et al. (2019), Panjaitan & Muslih (2019), Rosady & Abidin (2019), dan Arianti et al. (2019), penulis mendapatkan hasil yang berbeda dari berbagai penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan Lubis & Suryani (2018), mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan terjadinya manajemen laba semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Zakia et al. (2019), menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dimana hal tersebut menunjukkan jika semakin tinggi ukuran perusahaan maka akan mengakibatkan meningkatnya manajemen laba.

Namun, pada penelitian Panjaitan & Muslih (2019), berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut.

Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Rosady & Abidin (2019), menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya manajemen laba dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Arianti et al. (2019), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan akan tetap melakukan praktik manajemen laba tidak peduli ukuran perusahaan tersebut besar ataupun kecil.

Inkonsistensi yang terjadi dalam hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba seperti dalam penelitian Lubis & Suryani (2018), Panjaitan & Muslih (2019), Arianti et al. (2019), Zakia et al. (2019), Rosady & Abidin (2019), Muhammad & Pribadi (2020), Kusumawardhani & Khoiriyah (2021), dan Asy-Syarif & Sasongko (2021), kemudian dari fenomena-fenomena yang muncul terkait manajemen laba dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masih sedikitnya penelitian terdahulu mengenai manajemen laba dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitian dan tahun penelitian yang dilakukan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tahun 2019-2021.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2003). Pada tahun 2018 terdapat 116 BUMN, namun mulai tahun 2020 Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi korporasi dengan melakukan perampingan dan perbaikan portofolio jumlah BUMN sehingga saat ini hanya terdapat 48 BUMN.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Bonus dan *Political Cost* terhadap Manajemen Laba (Studi kasus pada Perusahaan BUMN Tahun 2019-2021)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terkait kompensasi bonus dan *political cost*, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN periode 2019 - 2021
- b. Apakah terdapat pengaruh *Political Cost* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN periode 2019 - 2021

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN periode 2019-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh *Political Cost* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN periode 2019-2021

1.4. Manfaat Penelitian

Atas dasar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Aspek Teoritis

Dalam hal keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan terkait bagaimana kompensasi bonus mempengaruhi manajemen laba dan berkontribusi pada literatur yang menyatakan *political cost* berdampak pada

manajemen laba dan tentunya sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hal yang berkaitan dengan kompensasi bonus, *political cost*, dan manajemen laba.

1.4.2. Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan membantu dalam membuat keputusan terkait praktik manajemen laba, agar menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba.
- b. Bagi investor, kreditor, dan pemerintah penelitian ini diharapkan membantu dalam memahami praktik manajemen laba sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Serta melakukan analisis yang mendalam terkait keadaan perusahaan untuk menghindari praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dapat merugikan investasinya.